



Jurnal Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

Analisis Pengaruh *Financial Performance* Terhadap *Unemployment Rate* Dengan *Economic Growth* Sebagai Variabel Intervening Pada Pemda Provinsi Di Indonesia

Suci Nurulita¹, Yefni² dan Hamdani Arifulyah³

¹Universitas Riau, Jurusan Akuntansi, email: suci.nurulita@lecturer.unri.ac.id

²Politeknik Caltex Riau, Program Studi Akuntansi, email: yefni@pcr.ac.id

³Politeknik Caltex Riau, Program Studi Akuntansi, email: dani@pcr.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *financial performance* pemerintah daerah provinsi terhadap *Unemployment Rate* dengan *economic growth* sebagai variabel intervening di Indonesia. *Financial performance* diukur menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. *Economic Growth* pada penelitian ini diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 menurut provinsi. Untuk *Unemployment Rate* diukur dengan persentase tingkat pengangguran terbuka yang ada di masing-masing provinsi. Populasi penelitian ini adalah 34 Pemerintah Daerah Provinsi se Indonesia selama 6 tahun penelitian yaitu pada tahun 2011 sampai tahun 2016. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis path dengan bantuan software SPSS versi 22. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara *financial performance* terhadap *economic growth* di Indonesia. Demikian juga antara *financial performance* dan *economic growth* tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan terhadap *Unemployment Rate* di Indonesia. Namun secara parsial variabel *financial performance* yang diukur dengan rasio efektivitas dan efisiensi memiliki pengaruh tidak langsung terhadap *Unemployment Rate* melalui *economic growth* di Indonesia.

Kata kunci: *Financial Performance, Unemployment Rate, Economic Growth*

Abstract

The purpose of this research was to analyse the effect of provincial government financial performance on unemployment rates with economic growth as an intervening variable in Indonesia. Measurement of Financial performance in this study are independence ratio, effectiveness ratio, and efficiency ratio. Economic Growth in this study was measured by using the GDP growth rate (Gross Regional Domestic Product) at constant prices with base on year 2010 by province. For unemployment rate is measured by the percentage of unemployment rates in each province. The population of this research is 34 Provincial Governments throughout Indonesia for 6 years in 2011 to 2016. Data analysis used in this research is path analysis method with SPSS version 22. The results of this study indicate that there is no significant effect between financial performance towards economic growth in Indonesia. Likewise between financial performance and economic growth there is no significant direct effect on the level of unemployment in Indonesia too. But partially the financial performance variables as measured

by the ratio of effectiveness and efficiency have an indirect influence on the level of open unemployment through economic growth in Indonesia.

Keywords: *Financial Performance, Unemployment Rate, Economic Growth*

1. Pendahuluan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah maka setiap Pemerintah Daerah (Pemda) baik Pemda Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, telah diberi wewenang yang besar untuk melaksanakan seluruh bentuk fungsi manajemen dalam urusan pemerintahan yaitu mulai dari tahap rancangan perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, kontrol, dan pemeriksaan serta evaluasi. Oleh karena itu, setiap Pemda bertanggungjawab untuk mengelola dan memberdayakan seluruh potensi daerahnya masing-masing seperti kemampuan sumber daya alam (SDA) yang ada, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, dan sumber daya finansial secara maksimal, yang bertujuan untuk dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara bebas, adil dan merata serta berkelanjutan tanpa melanggar prinsip *good governance*. Dalam pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan SDM yang berkualitas maupun, ketersediaan SDA yang cukup akan tetapi juga diperlukan sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dirumuskan dalam suatu anggaran Pemda yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah perkiraan maju atau rencana finansial tahunan yang berisikan rancangan estimasi penerimaan yang akan didapat, serta pengeluaran yang akan dilakukan untuk membiayai program kerja dan kegiatan pembangunan sesuai dengan ketetapan batas anggaran yang disetujui bersama oleh DPRD. Kinerja yang terkait dengan anggaran yaitu *financial performance* yang berupa rasio antara komponen-komponen anggaran dan realisasinya.

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator yang secara rutin dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator ini sangat penting selain inflasi, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan *economic growth*. Angka pengangguran mencerminkan program kegiatan kerja pembangunan daerah yang sudah dianggarkan apakah sudah tercapai dengan tepat sasaran untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. Angka pengangguran menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja yang merupakan hak bagi setiap warga negara yang sudah memasuki usia kerja. Berdasarkan data dari BPS bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2005 hingga tahun 2015 mengalami penurunan yang mana puncak angka pengangguran terjadi pada tahun 2005 dengan *Unemployment Rate* sebesar 11,9 juta orang atau 11,24%. Pada tahun 2015 *Unemployment Rate* di Indonesia sudah berangsur menurun menjadi 6,18% walaupun angka ini naik dibandingkan tahun 2014 lalu dimana *Unemployment Rate* sebesar 5,94% [2]. Dalam penelitian ini akan menganalisis apakah *financial performance* Pemda Provinsi dapat berpengaruh terhadap *Unemployment Rate* di Indonesia. *Financial performance* dalam penelitian ini berupa rasio kemandirian, rasio efisiensi, serta rasio efektifitas. Maksud diberlakukannya paket undang-undang otonomi daerah dan pengelolaan keuangan negara agar terbentuknya suatu daerah yang mandiri. Kemandirian daerah menggambarkan seberapa besar tingkat independensi suatu Pemda dalam hal pendanaan dan pengelolaan segala aktivitasnya. Efisiensi menunjukkan perbandingan realisasi antara pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah [6]. Sedangkan efektifitas merupakan perbandingan antara kemampuan Pemda dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target perencanaan berdasarkan potensi riil daerah [6].

Bertumbuhnya perekonomian suatu negara dapat mencerminkan keberhasilan perencanaan pembangunan yang berasal dari program kerja pemerintah. *Economic Growth* atau yang biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses perkembangan suatu daerah yang berkesinambungan secara keseluruhan dari berbagai aspek ekonomi menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Proses peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa yang akan terwujud dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional sangat mempengaruhi *economic growth* suatu daerah. Peningkatan dalam pendapatan nasional digambarkan oleh tingginya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah. Secara teori, PDB seharusnya memiliki hubungan positif

dengan penyerapan lapangan pekerjaan. PDB tinggi dapat diindikasikan bahwa nilai ekspor negara tersebut tinggi, sebaliknya nilai impornya rendah. Dengan nilai ekspor impor yang besar, maka aktivitas perdagangan makin reaktif. Perdagangan yang semakin aktif tentu akan menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan tenaga kerja yang terserap, tentunya angka pengangguran jadi menurun. Pengeluaran pemerintah pun juga dapat makin besar bila PDB makin tinggi. Kemampuan belanja pemerintah yang besar tentu menjadi kekuatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, pengangguran bisa makin berkurang jika laju pertumbuhan ekonomi makin memadai [13].

Berdasarkan data statistik dari BPS bahwa *Economic Growth* Indonesia tahun 2015 sebesar 4,79% merupakan pertumbuhan yang terendah dalam enam tahun terakhir dimana sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 6,81% [3]. Faktor yang mempengaruhi *Economic Growth* pada suatu negara tergantung dari SDA, SDM, modal, usaha, teknologi dan lainnya. Selain itu, suasana politik, sikap budaya, nilai moral, lembaga sosial, dan kelembagaan dari negara tersebut juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *economic growth* dalam segi non ekonomi. Penelitian ini memfokuskan kelembagaan dari negara yang mempengaruhi *economic growth* di Indonesia, khususnya kinerja pemerintahan dalam mengelola daerahnya masing-masing. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk mendorong pembangunan ekonomi khususnya infrastruktur perlu didukung dengan konsistensi kebijakan dan komitmen seluruh instansi pemerintah. Adapun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 % - 6,1% pada tahun 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar 2,7% - 3,1% dari PDB. Selain mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara-negara lain, pemerintah juga harus meningkatkan belanja sosial. Peningkatan belanja sosial juga bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sehingga bisa mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan [10].

Penelitian ini sudah banyak dilakukan, salah satunya (Hamzah, 2013) menggambarkan bahwa terjadi kesenjangan yang sangat tinggi dalam kinerja keuangan pada masing-masing daerah yang berbeda. Kesenjangan kinerja tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan masing-masing daerah dalam memberdayakan potensi daerahnya. Dengan demikian, maka secara otomatis telah terjadi perbedaan kemampuan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam meningkatkan pertumbuhannya, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan [7]. Pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh terhadap perkembangan suatu daerah yang berkorelasi pada *economic growth* jika dilakukan dengan tepat sasaran, serta pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabilitas yang memadai akan mendorong pembangunan dan tentu saja berefek pada peningkatan pembukaan lapangan pekerjaan. Dengan adanya pemerataan pendapatan menunjukkan tercapainya *economic growth*, hal ini berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan. Dengan memperhitungkan berbagai rasio tersebut diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian yang akan dievaluasi dan dianalisis dalam upaya perencanaan program kerja pemerintah sehingga mendorong dan meningkatkan *economic growth* yang selanjutnya berefek pada penurunan pengangguran.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 *Financial Performance*

Financial performance atau yang biasa disebut dengan kinerja keuangan merupakan hasil akhir yang dicapai dari pemanfaatan keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan sumber dan penggunaan keuangan. Jika perolehan melebihi dari target yang direncanakan maka kinerjanya bisa dikatakan sangat bagus demikian juga sebaliknya [7]. Analisis *financial performance* pada umumnya ditujukan untuk penilaian kinerja di masa lampau dengan membuat berbagai macam analisis sehingga didapat posisi keuangan yang mencerminkan kondisi entitas yang sebenarnya beserta keberlangsungan potensi-potensi kinerja yang akan datang. *Financial performance* merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan pengelola untuk menghasilkan keuntungan dengan sejumlah modal tertentu. Dilakukannya pengukuran kinerja

pada lembaga sektor publik bertujuan untuk membantu mengevaluasi kinerja pemerintah agar fokus pada tujuan, target dan sasaran program setiap unit kerja yang menjadi tanggungjawabnya. Selain itu, untuk pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan, serta untuk mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan [8]. Dengan demikian, gambaran dari hasil pengukuran akan memberikan dampak dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam menjalankan pelayanan publik. Terdapat beberapa ukuran kinerja yang dapat diperhitungkan pada organisasi pemerintahan untuk mengukur *financial performance*, dalam penelitian ini diantaranya yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi.

Rasio Kemandirian keuangan daerah adalah potensi Pemda untuk membiayai sendiri segala aktivitas kegiatan pemerintah, baik dari segi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana, serta pelayanan kepada rakyat [6]. Semakin tinggi PAD yang didapat oleh suatu Pemda maka persentase PAD untuk membiayai program kegiatan pelayanan pembangunan juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya [5]. Hal ini menunjukkan jika semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak pemerintah pusat atau lainnya semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Rasio efektivitas adalah potensi Pemda dalam mencapai PAD dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah [6]. Program dan kegiatan Pemerintah dikatakan efektif jika kegiatan tersebut tepat sasaran dan berpengaruh besar terhadap kemampuan dalam menyediakan fasilitas umum yang bermanfaat serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat sehingga memberikan pemasukan yang besar pada kegiatan tersebut. Semakin tinggi realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan yang dianggarkan, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi pengeluaran yaitu belanja dengan realisasi penerimaan daerah [6]. Semakin rendah rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Asumsi dikatakan efisien bahwa belanja yang dikeluarkan tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan. Efisiensi pada sektor publik yang berorientasikan pada pelayanan masyarakat merupakan suatu kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan secara tepat dengan pengorbanan biaya seminimal mungkin dan telah mencapai hasil (output) dengan biaya (input) yang terendah namun memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan.

2.2 *Economic Growth dan Pengangguran*

Perekonomian dalam suatu daerah dapat disebut mengalami pertumbuhan jika kemakmuran masyarakat berkembang dan kegiatan perekonomian tersebut menyebabkan meningkatnya produksi barang dan jasa di dalam masyarakat itu sendiri. *Economic growth* merupakan peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa mengukur apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Penurunan tingkat pengangguran atau *Unemployment Rate* merupakan dampak dari *economic growth* dalam penyediaan kebutuhan akan barang dan jasa sehingga terpenuhi dan dapat menaikan standar hidup disuatu daerah [7].

Pengertian pengangguran berdasarkan definisi dari BPS adalah terbagi menjadi empat kondisi yaitu para angkatan kerja dimana seseorang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau lagi mempersiapkan usaha, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai untuk bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Sedangkan mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya bukan termasuk sebagai angkatan kerja. Maka dapat disimpulkan, yang dianggap sebagai pengangguran hanyalah angkatan kerja kelompok penduduk usia produktif mulai usia 15 tahun hingga 64 tahun namun tidak bekerja dengan berbagai kondisi yang diklasifikasikan di atas.

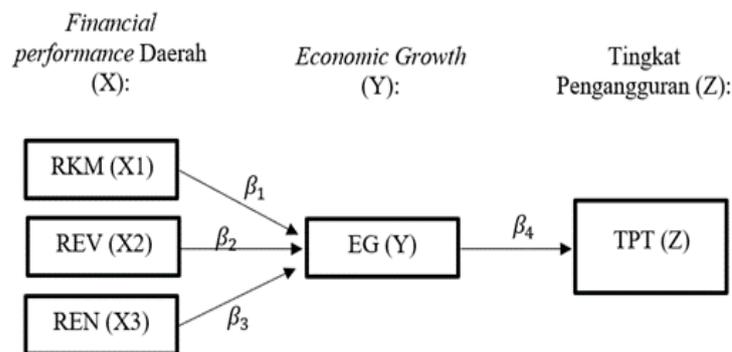
2.3 *Hubungan Financial performance dengan Economic growth dan Pengangguran*

Financial performance yang diukur dengan rasio kemandirian, efektivitas dan efisiensi memiliki peranan dan kontribusi terhadap *Unemployment Rate* dengan *economic growth* yang baik didaerah tersebut. *Financial performance* dalam kebijakan otonomi daerah (desentralisasi fiskal) yang memberikan kewenangan kepada Pemda untuk mengelola anggarannya sendiri sesuai dengan kebijakan daerahnya, dimana hal tersebut apabila direalisasikan secara tepat maka dari segi kemandirian dalam mengelola potensi didaerahnya akan dapat meningkatkan PAD di

berbagai daerah, sehingga akan meningkatkan pula pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Penciptaan lapangan kerja sebagai akibat pertumbuhan ekonomi akan menyerap angkatan kerja, dan mengurangi jumlah pengangguran. Semakin besar pencapaian target yang sudah direncanakan dalam program kerja daerah tersebut maka semakin efektif dan efisien pengelolaan daerah tersebut sehingga seharusnya *economic growth* terdorong menjadi meningkat yang akan menurunkan *Unemployment Rate* setiap daerah.

3. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode *Path Analysis* dengan menggunakan aplikasi *software* SPSS versi 22. Populasi dalam penelitian ini adalah 34 Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *Purposive sampling*, berarti teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu [11], dimana kriteria sampelnya adalah wilayah provinsi yang mempublikasikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari tahun 2011-2016 secara lengkap. Penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial performance* pemerintah daerah provinsi terhadap *Unemployment Rate* melalui *economic growth* di Indonesia.



Gambar 1. Desain Penelitian

Rumus perhitungan rasio kemandirian tersebut adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer} + (\text{Utang} - \text{Utang PFK} - \text{Utang Pajak})} \times 100\% \quad (1)$$

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin besar rasionya menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal berupa pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi lainnya semakin kecil, hal tersebut dikarenakan besarnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam PAD yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat [6], demikian juga sebaliknya.

Rasio efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan [6]. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\% \quad (2)$$

Semakin tinggi realisasi PAD dibandingkan targetnya, maka semakin efektif *financial performance* pada daerah tersebut demikian juga sebaliknya. Penilaian *financial performance* berupa rasio efisiensi dapat ditentukan dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan [4].

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\% \quad (3)$$

Semakin rendah rasio ini, maka semakin efisien kinerja Pemda setempat dalam melaksanakan keuangan daerahnya, demikian juga sebaliknya.

Economic growth dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar yaitu tahun 2010 menurut provinsi. Untuk *economic growth* diukur PDRB saat ini dikurangi dengan PDRB sebelumnya dibagi dengan PDRB saat ini. Formula untuk menghitung laju *economic growth* yaitu (dalam Yuana [14]):

$$EG = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \quad (4)$$

Adapun persamaan regresi untuk menguji hipotesisnya adalah:

$$TPT = \alpha + \beta_1 RKM + \beta_2 REV + \beta_3 REN + e \quad (5)$$

Rumusan pengembangan Hipotesis yang akan diuji adalah:

- H₁: *Financial performance* yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Economic Growth*.
 H₂: *Economic Growth* dan *Financial Performance* secara simultan berpengaruh langsung signifikan terhadap *Unemployment Rate*.
 H₃: *Financial performance* yaitu Rasio Kemandirian, berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap *Unemployment Rate* melalui *Economic growth*.
 H₄: *Financial performance* yaitu Rasio Efektivitas, berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap *Unemployment Rate* melalui *Economic growth*.
 H₅: *Financial performance* yaitu Rasio Efisiensi, berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap *Unemployment Rate* melalui *Economic growth*.

4. Hasil Pembahasan

4.1 Analisis Pengujian Hipotesis Model Pertama

1) Pengaruh *Financial Performance* yang diukur dengan rasio kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi secara simultan terhadap *Economic Growth*.

Untuk pengaruh secara simultan dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.507	3	2.169	1.295	.279 ^b
	Residual	227.776	136	1.675		
	Total	234.283	139			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi (PE)

b. Predictors: (Constant), Rasio Efisiensi (REN), RKM, Rasio Efektivitas (REV)

Sumber: *Data olahan SPSS, 2018*

Pada uji F statistik apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, dan berlaku pula sebaliknya. Dari hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 1 tersebut bahwa F hitung sebesar 0,279 lebih besar dari tingkat kesalahan alpha 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak layak. Hal ini berarti secara simultan pengujian tiga variabel *Financial Performance* secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap *Economic Growth* di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 tidak terdukung.

Berdasarkan data LKPD Pemda Provinsi pada 33 provinsi di Indonesia (hasil olahan 2018), meskipun *financial performance* berupa rasio kemandirian daerah dan rasio efektivitas pada kriteria cukup bagus dan efektif, yang mencerminkan realisasi penerimaan PAD melebihi target serta rasio efisiensi yang mencerminkan banyaknya penyerapan belanja dan pengeluaran, namun peningkatan PAD tidak sejalan dengan peningkatan pertumbuhannya karena dalam rentang waktu tersebut angka

economic growth masih berada di bawah 5% atau bisa dikatakan rendah, yaitu dengan rata-rata sebesar 4,31%. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syamsudin et al., 2015 [12] dan juga penelitian yang dilakukan oleh Astuti, 2015 [1].

4.2 Analisis Pengujian Hipotesis Model Kedua

Model regresi kedua untuk melihat pengaruh secara tidak langsung terhadap *Unemployment Rate* dengan ditambahkan variabel *intervening* yakni *Economic Growth* dapat dilihat pada Tabel 2.

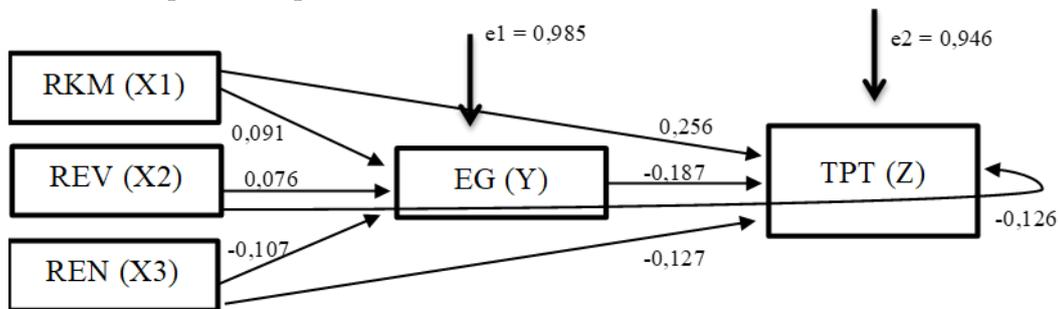
Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Model Kedua (Uji T)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	1					
	(Constant)	3.707	.811		4.570	.000
	Rasio Kemandirian	.038	.012	.256	3.089	.002
	Rasio Efektivitas (REV)	-.005	.004	-.126	-1.503	.135
	Rasio Efisiensi (REN)	-.010	.007	-.127	-1.509	.134
	Economic Growth (EG)	-.060	.027	-.187	-2.261	.025

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran Terbuka

Sumber: Data olahan SPSS, 2018

Hipotesis dikatakan diterima apabila nilai uji t-nya lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dari t hitung tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, begitu juga sebaliknya. Untuk diagram jalur model struktur kedua dari *analisis path* dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Diagram Jalur Struktur Kedua

Berdasarkan Tabel No.2 dan Gambar No.2 tersebut diperoleh interpretasi model regresi kedua sebagai berikut:

1) Pengaruh langsung *Economic Growth* dan *Financial Performance* secara simultan terhadap *Unemployment Rate*.

Setelah dilakukan pengujian kedua, secara parsial berdasarkan tabel 2 tersebut dapat dilihat bahwa hanya variabel rasio kemandirian dan *Economic Growth* saja yang berpengaruh secara langsung terhadap *Unemployment Rate* di Indonesia yaitu dengan nilai 0,002 dan 0,025 lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05. Untuk pengaruh secara simultan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji F Model Regresi Kedua

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.551	4	.638	3.916	.005 ^b
	Residual	21.986	135	.163		
	Total	24.537	139			

a. Dependent Variable: Tingkat Pengangguran Terbuka

b. Predictors: (Constant), Economic Growth (EG), Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas (REV), Rasio Efisiensi (REN)

Sumber: Data olahan SPSS, 2018

Pada hasil uji F statistik model kedua dapat dilihat pada tabel 3 tersebut bahwa F hitung sebesar 0,005 lebih kecil dari tingkat kesalahan alpha 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi layak. Hal ini berarti secara simultan pengujian tiga variabel *Financial Performance* dan *Economic Growth* secara langsung berpengaruh signifikan terhadap *Unemployment Rate* di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 terdukung.

Hal ini mengindikasikan bahwa dengan *financial performance* pemerintah yang mencerminkan kemandirian daerah dalam mengurus rumah tangga daerahnya masing-masing pada kriteria baik, dan efektif serta penyerapan belanja ataupun pengeluaran yang memadai dan tepat sasaran secara simultan dengan indikator *economic growth* mempengaruhi secara langsung *Unemployment Rate*. Pengangguran bisa makin berkurang jika laju pertumbuhan ekonomi makin melesat dimana kinerja keuangan pemerintah berperan didalamnya. Secara umum tingkat pengangguran terbuka di Indonesia selama enam tahun periode pengamatan cukup tinggi yakni mencapai 5,10% berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih rendah berada di bawah 5%. Kinerja keuangan pemerintah pun masih belum optimal dimana terdapat kurang efisiennya dalam pengalokasian belanja (pada periode pengamatan penelitian) di dapat score 98,35% dan nilai tersebut dapat dikategorikan kurang efisien. Semakin tinggi tingkat efisiensi, maka tingkat efektivitas juga akan semakin rendah, sehingga kondisi ini dapat dikatakan tidak baik.

2) Pengaruh tidak langsung *Financial performance* yaitu Rasio Kemandirian terhadap *Unemployment Rate* melalui *Economic growth*.

Berdasarkan Gambar 2 diketahui *score* pengaruh langsung yang diberikan variabel rasio kemandirian (X1) terhadap *Unemployment Rate* (Z) adalah 0,256, sedangkan pengaruh tidak langsung variabel tersebut melalui *economic growth* (Y) terhadap *Unemployment Rate* (Z) adalah sebesar -0,017 yang merupakan hasil perkalian dari nilai beta variabel X1 terhadap variabel Y dengan nilai beta Y terhadap Z ($0,091 \times -0,187 = -0,017$). Sehingga didapatkan nilai $0,256 > -0,017$ yang artinya pengaruh langsung lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel rasio kemandirian melalui *Economic Growth* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Unemployment Rate* di Indonesia. Maka dengan ini disimpulkan H3 ditolak.

Rasio kemandirian mengukur tingkat independensi suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang berasal dari pajak dan lainnya untuk membiayai pengeluaran daerah. Tingginya tingkat kemandirian tidak selalu diikuti dengan *economic growth* karena ketika angka PAD tidak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk maka *economic growth* tidak akan meningkat, apalagi jika dibarengi juga dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tidak meratanya penggunaan PAD untuk kesejahteraan penduduk seperti pendidikan yang mencakup pelatihan dan kegiatan pendidikan lainnya tidak akan berdampak pada *economic growth* sehingga juga tidak akan dapat mengurangi pengangguran.

3) Pengaruh tidak langsung *Financial performance* yaitu Rasio Efektivitas terhadap *Unemployment Rate* melalui *Economic growth*.

Cara perhitungan yang sama untuk melihat pengaruh langsung yang diberikan variabel rasio efektivitas (X2) terhadap *Unemployment Rate* (Z) dan pengaruh tidak langsung variabel tersebut melalui *Economic Growth* (Y) terhadap *Unemployment Rate* (Z) berdasarkan gambar 2 tersebut didapatkan $score -0,126 < -0,014$ yang artinya pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel rasio efektivitas melalui *Economic Growth* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Unemployment Rate* di Indonesia. Maka dengan ini disimpulkan H4 diterima. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan pemerintah dalam mendorong penerimaan pendapatan aktual agar sesuai dengan yang telah ditargetkan. Dalam Nurulita [9] menyatakan bahwa rasio efektivitas yang tinggi yang diikuti dengan penyediaan infrastruktur yang bagus akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan pengangguran. Ketika aktual penerimaan daerah lebih besar daripada target penerimaan dan penerimaan tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan angkatan kerja, maka akan berdampak pada peningkatan *economic growth* yang pada akhirnya akan dapat mengurangi *Unemployment Rate* di daerah tersebut. Selain itu, kegiatan pembangunan infrastruktur yang meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan daerah akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran, terutama pekerja serabutan sehingga *Unemployment Rate* dengan sendirinya akan berkurang.

4) Pengaruh tidak langsung *Financial performance* yaitu Rasio Efisiensi terhadap *Unemployment Rate* melalui *Economic growth*.

Sama halnya perhitungan dengan yang sebelumnya, berdasarkan *path diagram* Gambar 2 didapatkan pengaruh langsung yang diberikan variabel rasio efisiensi (X3) terhadap *Unemployment Rate* (Z) adalah $-0,127$, sedangkan pengaruh tidak langsung variabel tersebut melalui *Economic Growth* (Y) terhadap *Unemployment Rate* (Z) adalah sebesar $0,02$ yang artinya pengaruh langsung lebih kecil dari pengaruh tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung variabel rasio efisiensi melalui *Economic Growth* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Unemployment Rate* di Indonesia. Maka dapat disimpulkan H5 diterima. Rasio efisiensi menggambarkan penghematan pemerintah daerah dalam kegiatan konsumsi atau belanja daerah. Dalam Nurulita [9] menyatakan bahwa ketika rasio efisiensinya besar, maka pemerintah tersebut tidak efisien dalam membelanjakan untuk membiayai program kegiatan pembangunan daerah, serta menunjukkan fungsi pengendalian yang lemah. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan *economic growth* karena masyarakat tidak mendapatkan *benefit* dari peningkatan angka PAD, apalagi hampir 70% belanja daerah merupakan pembayaran gaji dan honorarium. Dengan demikian, maka angka pengangguran akan semakin meningkat walaupun dibarengi dengan pendidikan yang tinggi pula.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Secara simultan, tidak terdapat pengaruh langsung *financial performance* pemerintah provinsi terhadap *economic growth* di Indonesia.
- 2) Secara simultan, pengujian tiga variabel *financial performance* dan *economic growth* secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap *Unemployment Rate* di Indonesia.
- 3) Terdapat pengaruh tidak langsung antara rasio efektivitas dan efisiensi penerimaan pemerintah provinsi terhadap *Unemployment Rate* melalui *economic growth* di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian juga menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh tidak langsung rasio kemandirian pemerintah provinsi terhadap *Unemployment Rate* melalui *economic growth* di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Astuti, W. “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011)”. *Jurnal EBBANK*, 6 (1 Juli 2015), 1–18. 2015.
- [2] BPS., “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi 1986-2016”. Retrieved from <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/981>. 2016.
- [3] BPS., “Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017”. Badan Pusat Statistik. <https://doi.org/7203002>. 2017.
- [4] Budiarto, B., “Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah”. Surabaya: Seminar Ekonomi Daerah. 2007.
- [5] Florida, A., “Pengaruh Pendapatan asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatra Utara”. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatra Utara. 2006.
- [6] Halim, A., M. S. K., “Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah (Empat)”. Jakarta: Salemba Empat. 2014.
- [7] Hamzah, A., “Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur”. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. 2013.
- [8] Mardiasmo., “Akuntansi Sektor Publik”. Yogyakarta: ANDI. 2009.
- [9] Nurulita, S., Hamdani, A., Yefni., “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Riau”. *Jurnal Benefita*, 3(3), 336–356. 2018.
- [10] Setyowati, D., “Sri Mulyani: Sejak 2013 Pertumbuhan Ekonomi Sulit Kurangi Kemiskinan”. Retrieved from <https://katadata.co.id/berita/2017/06/06/sri-mulyani-sejak-2013-pertumbuhan-ekonomi-sulit-kurangi-kemiskinan>. 2017.
- [11] Sunyoto, D., “Uji khi kuadrat Regresi dan Untuk Penelitian”. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- [12] Syamsudin, Cahya, B. T., & Dewi, S. N. “Pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan kemiskinan”. *Jurnal Manajemen Sumber Daya*, Volume 17(No. 1), 15–27. 2015.
- [13] Sucipto, Rakhmat Hadi., “Ironi PDB VS Pengangguran”. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/04/25/o66xmq1-ironi-pdb-vs-pengangguran>. 2016.
- [14] Yuana, A. P., “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2008-2012)”. *Jurnal Ilmiah: Universitas Brawijaya. Malang*. 2014.